

**YURIDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN PENDUDUK SIPIL DI AFRIKA TENGAH OLEH PARA
PIMPINAN MILISI ANTI BALAKA DAN SELEKA**

Marsha Mareta

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. J.M Atik Krustiyati, S.H., M.S.

2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana tindakan Pegawai Pemerintahan dalam menjaga asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai PNS) dalam menerapkan tugasnya sebagai unsur dari aparatur itu sendiri haruslah netral dari berbagai macam pihak luar atau yang sedang berlomba dalam menjaring suara, baik secara langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan dalam sebuah proses berpolitik seperti Pemilu karena Pegawai Negeri merupakan pelayan publik dan pegawai negeri yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak., dimana mereka turut serta mendukung dan menghadiri pendeklarasian salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat pemilihan umum tahun 2019 yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masuk didalam rana hukum bagi setiap anggota aparatur sipil negara.

Kata kunci: Pemilu, Pegawai negeri Sipil, kode etik, Pembinaan

**PARTICIPATION OF STATE CIVIL REGISTRATORS AGAINST ONE
OF THE PROSPECTIVE COUPLES AT THE GENERAL ELECTION
REVIEWED FROM LAW NUMBER 5 YEAR 20014 CONCERNING
JUNCTO CIVIL APARTMENTS GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 42 OF 2004 CONCERNING CORPORATE DEVELOPMENT
AND CODE OF CIVIL EMPLOYEES (PNS)**

Marsha Mareta

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. J.M Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the extent to which the actions of Government Employees in maintaining the principle of Neutrality of Civil Servants (hereinafter referred to as PNS) in implementing their duties as an element of the apparatus itself must be neutral from various kinds of outsiders or who are competing in capturing votes, either directly and indirectly required in a process of politics as the Election for public servants are public servants and public servants who truly stand independently without having to take sides., in which they participate and support and attend the declaration of one candidate for president and vice president at the time of the 2019 general election which is related to the applicable laws and regulations and is included in the legal framework for every member of the state civil apparatus factors are weak state conditions and the occurrence of group and group discrimination.

Keywords: *Refugees, discrimination, rebellion, regime, religion, Protocol II, Geneva Convention*